

DISERTASI

PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI
DKI JAKARTA



PUADI
NPM: 216701519003

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU POLITIK
2025

DISERTASI

PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI
DKI JAKARTA



PUADI
NPM: 216701519003

**Disertasi Ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor Ilmu Politik**

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU POLITIK

2025

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Promotor.
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan judul buku/tulisan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 19 Februari 2025

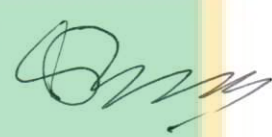
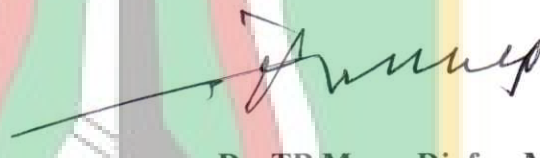
Yang Membuat Pernyataan,



PUADI

NPM: 216701519003

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI
(TERBUKA)**

Judul Disertasi Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi DKI Jakarta	
Promotor  Prof. Dr. Lili Romli	Ko-Promotor  Dr. Asran Jalal, M.Si
 Mengetahui Program Doktor Ilmu Politik Ketua,  Dr. TB Massa Djafar, M.Si Tanggal :	
Nama : PUADI NPM : 216701519003	

HASIL UJIAN PROMOSI

Disertasi yang ditulis oleh **PUADI**, pada Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dengan judul:

PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 19 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai dan predikat

Jakarta, 19 Februari 2025
TIM PENGUJI,



NAMA

KETUA SIDANG : Prof. Dr. Umar Basalim, DES

PROMOTOR : Prof. Dr. Lili Romli

KO-PROMOTOR : Dr. Asran Jalal, M.Si

PENGUJI : Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A

PENGUJI : Dr. TB. Massa Djafar, M.Si

PENGUJI AHLI : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

TANDA TANGAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan disertasi yang berjudul “PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik pada Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Lili Romli, selaku promotor, yang telah membimbing penulisan disertasi. Beliau dengan penuh perhatian memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan disertasi, memberikan alternatif rujukan, mengoreksi draf disertasi agar lebih sempurna dan selalu menyiapkan waktu setiap saat, sehingga tidak ada kendala untuk ketemu dan melakukan konsultasi.
2. Dr. Asran Jalal, M.Si, selaku ko promotor, yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan disertasi dengan intensif mengirim pesan agar penulis tetap aktif. Beliau selalu cepat merespon setiap penulis meminta saran dan koreksi atas draf disertasi selama proses penulisan dengan tambahan hasil koreksi yang sangat membantu penulisan disertasi.
3. Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal perkuliahan terutama dalam mengajarkan penulisan disertasi, suatu ilmu yang tidak mungkin terlupakan penulis, semoga ilmu politik yang beliau berikan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara.

4. Dr. TB. Massa Djafar, M.Si, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Politik yang tidak henti-hentinya selalu memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan disertasi, bahkan setiap saat siap melayani konsultasi dari mulai proposal sampai akhir bab disertasi.
5. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, selaku Penguji yang telah memberikan masukan terhadap disertasi ini sehingga disertasi ini dapat lebih sempurna dari sebelumnya.
6. Terima kasih kepada Istriku tersayang, Siti Nur Subhiani, S.Pd., M.Pd. yang selalu memberi semangat dan doanya. Terima kasih juga kepada anak-anakku tercinta Futi Thurfah Nada dan Azmi Oktafiano, atas doa dan kesabarannya selama proses penyusunan disertasi ini.

Akhirnya penulis juga sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, bagi mereka yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Jakarta, 19 Februari 2025

Penulis,



Puadi

ABSTRAK
Universitas Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Doktor Ilmu Politik

A. Nama : Puadi
B. NPM : 216701519003
C. Judul : Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta
D. Isi Abstrak :

Pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawal pemilu berintegritas sangat dipengaruhi dinamika politik yang menyertainya. Dinamika politik pengawasan pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam pemilu dan melibatkan berbagai aktor politik yang saling berinteraksi saling berpengaruh satu sama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap permasalahan pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap, pembatasan pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan yang melibatkan ASN, praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam verifikasi parpol peserta pemilu, yang ditemukan Bawaslu DKI Jakarta pada saat pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2019. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak 2019. Adapun metode penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan narasumber. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang berupa relevansi dan keterkaitan informasi terhadap penelitian. Berbagai data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif Miles dan Huberman, yakni dianalisis secara siklus ke dalam tiga tahap, yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam *stakeholder* kunci yang terlibat dalam pengawasan Pemilu Serentak di Indonesia, yaitu Bawaslu, KPU, Pemerintah, Pemilih (masyarakat), Partai Politik, dan Gakkumdu yang memiliki peran penting yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu bertindak sebagai pengawas utama, sementara KPU mengurus penyelenggaraan teknis. Salah satu temuan utama adalah peran sentral Bawaslu DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Peran sentral tersebut digunakan pada beberapa tantangan seperti: kendala pemutakhiran data daftar pemilih tetap; pembatasan terhadap calon legislatif mantan narapidana; kampanye pada institusi pendidikan; praktik politik uang; dan isu keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Bawaslu, Peran Aktor, Interaksi Kepentingan.

ABSTRACT
National University
Faculty of Social and Political Sciences
Political Science Doctoral Study Program

A. Name : Puadi
B. NPM : 216701519003
C. Title : THE PROBLEMATICS OF THE 2019 SIMULTANEOUS
ELECTION SUPERVISION AT DKI JAKARTA PROVINCE
D. Abstract Content :

The implementation of the role of Bawaslu DKI Jakarta Province in overseeing elections with integrity is greatly influenced by the accompanying political dynamics. The political dynamics of election supervision can occur at various stages in the election and involve various political actors who interact and influence each other. This study aims to determine and analyze the role of Bawaslu in supervising the problems of updating and determining permanent voter data, restrictions on the nomination of legislative members for former convicts, campaigns in educational institutions involving the Civil Servant, the practice of money politics in campaigns, and the fulfillment of the 30% quota for women's representation in the verification of political parties participating in the election, which were found by Bawaslu DKI Jakarta in the implementation of supervision of the 2019 simultaneous elections. In addition, it also aims to determine and analyze the interaction of interests between election participants (political parties and legislative candidates), KPU, government, and the community regarding various problems handled by Bawaslu DKI Jakarta in the implementation of supervision of the 2019 simultaneous elections. The qualitative research method uses the constructivism paradigm. This study uses two types of data, namely: primary data and secondary data. Primary data was obtained through informants and sources. Secondary data consists of official documents in the form of relevance and relevance of information to the research. The various data are then analyzed using the Miles and Huberman qualitative analysis method, namely analyzed cyclically into three stages, namely: data codification, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of the study indicate that six key stakeholders involved in the supervision of the Simultaneous Elections in Indonesia, namely Bawaslu, KPU, Government, Voters (community), Political Parties, and Gakkumdu have important roles that are interrelated in ensuring that the election process takes place fairly, transparently, and in accordance with democratic principles. Bawaslu acts as the main supervisor, while the KPU takes care of the technical implementation. One of the main findings is the central role of Bawaslu DKI Jakarta as a supervisory institution that faces major challenges in carrying out its supervisory function effectively. This central role is used in several challenges such as: obstacles to updating the Permanent Voter List Data; restrictions on former convict legislative candidates; campaigns in educational institutions; money politics practices; and the issue of women's representation in parliament.

Keywords: Election, Supervision, Bawaslu, The Role of Actors, Interaction of Interests.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI	iii
HASIL UJIAN PROMOSI DOKTOR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Demokrasi.....	17
2. Teori Pemilu Demokratis.....	27
3. Teori Pengawasan Pemilu	36
4. Teori Independensi Penyelenggara Pemilu	59
5. Teori Interaksi Kepentingan	69
F. Alur Pemikiran Penelitian	77
G. Metode Penelitian	78
1. Desain Penelitian	78
2. Sumber dan Jenis Data	82
3. Pemilihan Informan	83
4. Instrumen Penelitian	84
5. Teknik Pengumpulan Data	85
6. Pengujian Keabsahan Data	87
7. Analisis Data.....	87

H. Sistematika Penulisan	91
BAB II GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI INFORMAN	94
A. Gambaran Umum	94
1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta.....	96
2. Deskripsi Subjek Penelitian.....	99
B. Deskripsi Institusi Asal Informan Penelitian.....	103
1. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)	103
2. KPU (Komisi Pemilihan Umum)	105
3. Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)	106
4. Pemerintah	107
5. Partai Politik	109
6. Masyarakat (Pemilih)	111
BAB III EKSISTENSI BAWASLU DALAM DESAIN PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA	113
A. Urgensi Kehadiran Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu	113
B. Desain Pengawasan Pemilu Dalam Konstitusi Dan Undang-Undang Pemilu	124
1. Eksistensi Lembaga Pengawas Pemilu Pasca Masa Reformasi	130
2. Eksistensi Bawaslu Menjadi Lembaga Pemilu Yang Mandiri ..	133
3. Eksistensi Kelembagaan Bawaslu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.....	140
4. Desain Kelembagaan Bawaslu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	145
C. Konsolidasi Kelembagaan Bawaslu Dalam Mengawal Pemilu	150
1. Konsolidasi Internal Lembaga Bawaslu	154
2. Konsolidasi Eksternal Bawaslu Dengan Pemangku Kepentingan.....	157
BAB IV PERAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA.....	168
A. Peran Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)	169

B. Peran Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana.....	203
C. Peran Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)	222
D. Peran Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye.....	240
E. Peran Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik.....	257

BAB V INTERAKSI KEPENTINGAN ANTAR AKTOR DALAM PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA..... 277

A. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	278
B. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana.....	295
C. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	305
D. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye	318
E. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik .	330

BAB VI PENUTUP 334

A. Kesimpulan.....	334
1. Peran Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di DKI Jakarta	334
2. Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di DKI Jakarta	336
B. Implikasi Teori	338
1. Implikasi Terhadap Teori Pengawasan	338
2. Implikasi Terhadap Teori Independensi Pengawasan Pemilu ..	339
3. Implikasi Terhadap Teori Interaksi Kepentingan	339
C. Saran/Rekomendasi	340
1. Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)..	340
2. Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana.....	341

3. Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	341
4. Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye.....	341
5. Pengawasan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik.....	342

DAFTAR PUSTAKA.....	343
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	357
----------------------	------------

